

**EFEKTIVITAS PASAL 20 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BULELENG NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMINDAHAN DAN
PENGHAPUSAN LOKASI PKL DI KAWASAN KOTA SINGARAJA.**

Oleh

Komang Diah Prabawati Putri, NIM 2114101023

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesenjangan yang ditemukan pada Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 6 Tahun 2015 terkait Pemindahan dan Penghapusan Lokasi Pedagang Kaki Lima di kawasan Kota Singaraja dengan keberadaan PKL yang melanggar aturan, serta mengetahui dan menganalisis tindakan penegakan hukum yang diterapkan terhadap Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi ketentuan pemindahan dan penghapusan yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 6 Tahun 2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang digunakan yakni deskriptif, sumber data yang digunakan yaitu primer, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, observasi, wawancara,. Teknik pengumpulan sampel penelitian dengan teknik *Non Probability Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahap-tahap konseptualisasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 Pasal 20 belum dikatakan efektif dikarenakan pemerintah daerah kurang tegas, kurang adanya koordinasi yang baik antar instansi yang berkaitan, (2) Upaya dari penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima yang keberadaannya melanggar aturan, dapat dilakukan melalui pengarahan kepada Masyarakat dan instansi yang melanggar Perda, serta melakukan penegakan hukum sesuai dengan SOP Satpol PP, melakukan Pembinaan dan atau Sosialisasi kepada masyarakat dan Badan Hukum. Melihat berbagai hal tersebut tentu sangat diperlukan adanya penegakan hukum yang baik oleh pemerintah, peningkatan dengan instansi terkait serta membangun komunikasi antar pemerintah daerah dengan pusat.

Kata Kunci : Efektivitas, Pedagang Kaki Lima, dan Pemerintahan Daerah

**THE EFFECTIVENESS OF ARTICLE 20 OF BULELENG DISTRICT REGULATION
NUMBER 6 OF 2015 CONCERNING THE RELOCATION AND ELIMINATION OF
STREET VENDORS IN SINGARAJA CITY AREA.**

By

Komang Diah Prabawati Putri, NIM 2114101023

Law Studies Program

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the gaps found in Article 20 of Buleleng Regency Regional Regulation No. 6 of 2015 related to the Transfer and Removal of Street Vendor Locations in the Singaraja City area with the existence of street vendors who violate the rules, as well as to determine and analyze the law enforcement actions applied to street vendors who do not comply with the provisions of the transfer and removal regulated in Article 20 of Buleleng Regency Regional Regulation No. 6 of 2015. The type of research used is empirical legal research. The nature of the research used is descriptive, the data sources used are primary, secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques through document study, observation, interviews,. The technique of collecting research samples using Non Probability Sampling techniques. Data processing and analysis techniques are analyzed descriptively qualitatively starting the conceptualization stages. The results showed (1) Regional Regulation No. 6 of Article 20 has not been said to be effective because the local government is less assertive, there is a lack of good coordination between related agencies, (2) Efforts from law enforcement against Street Vendors whose existence violates the rules, can be done through direction to the Community and Legal Entities that violate the Regional Regulation, as well as carrying out law enforcement in accordance with the Satpol PP SOP, conducting Coaching and or Socialization to the community and Legal Entities. Seeing these various things, of course it is very necessary for good law enforcement by the government, improvement with related agencies and building communication between local governments and the center.

Keywords: *Effectiveness , Street Vendors, local Government.*